BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kualitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Kualitas aparatur dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mengukur kinerja organisasi. Sumber daya manusia yang baik atau berkualitas dapat mempercepat kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan kepada kepada masyarakat. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung adalah salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas untuk mengatur tata ruang Kota agar sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung.

Berdasarkan program kerja pemerintah Kota Bandung dalam penertiban keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung yang di emban oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan, maka dilakukan beberapa program kerja untuk menjadikan Kota Bandung bebas reklame insidentil yang liar atau illegal. Pelaksanaan Program Kerja Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam menertibkan reklame insidentil di Kota Bandung adalah dengan melakukan pengawasan yang efektif.

Melakukan pengawasan yang efektif adalah tugas dan kewajiban dari sumber daya manusia atau aparatur yang berada dalam lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Untuk mencapai kinerja organisasi

yang baik, maka dapat dilihat dari kualitas aparatur yang berada di dalamnya. Mengukur kualitas aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dapat dilihat dari cara yang dapat mengukur kualitas aparatur dalam melakukan pengawasan reklame insidentil adalah dengan tidak melakukan kesalahan teknis dan non teknis, melakukan pekerjaan dengan akurat dan melaksanakan pengawasan dengan cermat atau teliti untuk mencapai tujuan dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, kualitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil adalah dengan cara mengoptimalkan seluruh rangkaian kegiatan atau proses pengawasan. Melakukan pengawasan dengan rutin sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Aparatur DPP Kota Bandung sudah melaksanakan tugas pengawasan keberadaan reklame insidentil sesuai dengan jadwal yang disediakan. Menurut Bapak Yanuar Pribadi S.Sos. “pengawasan biasanya 1 minggu itu 2 kali, ya dikalkulasikan saja berapa kali 1 bulannya”.(21/06/2012). Artinya adalah aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan melakukan pengawasan 2 kali dalam satu minggu dan delapan kali dalam satu bulan. Aparatur DPP Kota Bandung sudah melaksanakan proses pengawasan keberadaan reklame insidentil menggunakan alat inventaris operasional lapangan yang disediakan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Melaksanakan pengawasan secara rutin belum menghasilkan kualitas yang baik jika tidak ada aspek-aspek yang lain yang mendukung terciptanya kualitas

tersebut. Jadwal dua kali dalam seminggu tidak memberikan efektivitas terhadap pengawasan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Tidak efektifknya jadwal dua kali dalam seminggu disebabkan masih banyaknya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan proses pengawasan keberadaan reklame insidentil seperti masih sering terjadi salah memasukan data wilayah titik tiang pancang reklame insidentil yang harus diawasi, masih banyak alat-alat inventaris operasional lapangan yang tidak berfungsi dan layak pakai ketika melakukan proses pengawasan di kantor maupun lapangan. Alat-alat seperti komputer yang kurang untuk memasukan data reklame insidentil serta alat transportasi yang minim menimbulkan masalah dalam melaksanakan proses pengawasan reklame inseidentil yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman Kota Bandung.

Menurut wawancara dengan masyarakat pun, tingkat kecermatan yang dimiliki aparatur Dinas Pemkamaman dan Pertamanan Kota Bandung menjadi faktor yang penting untuk mencapai kualitas. Kecermatan aparatur DPP Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil belum optimal karena masih banyaknya keterlambatan menanggapi keluhan-keluhan dari masayarakat. Banyaknya laporan-laporan yang tertunda yang disebabkan aparatur tidak dapat memilah-milah pekerjaan yang mana yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan penelitian yang peneliti amati di lapangan, kualitas akan tercipta jika semua aspek yang mempengaruhi atau yang mendukung dapat seimbang dan berjalan dengan baik. Tercapainya kualitas dilihat dari seberapa

jauh tingkat kesalahan yang dilakukan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan dengan cara, mengkolaborasikan aparatur yang berusia 25-35 thn dengan usia 42-55 thn untuk memasukan data reklame dan melakukan pengecekan data secara bersama-sama. Setelah tingkat kesalahan, tingkat kerusakan yang dilakukan aparatur harus diperkecil, karena fakta dilapangan kerusakan-kerusakan yang terjadi dikarenakan tidak adanya pemeliharaan yang baik oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Kecermatan yang dilakukan oleh aparatur DPP Kota Bandung masih belum cukup untuk melakukan pengawasan keberadaan reklame Insidentil.

4.1.1 Tingkat Kesalahan yang Dilakukan Aparatur Dalam Melaksanakan Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung

Ada tiga cara untuk mendapatkan kualitas sebuah organisasi, yaitu bagaimana kinerja seorang aparatur yang berada didalamnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Kualitas kinerja apartur dapat dilihat dari tiga cara yang pertama yaitu dari tingkat kesalahan yaitu seberapa jauh kemampuan seorang aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan mampu melakukan pekerjaannya. Untuk mengetahui sebarapa jauh kemampuan seorang aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam melakukan pekerjaannya dalam mengawasi keberadaan reklame insidentil adalah dengan melihat kemampuan aparatur dalam proses pengawasan reklame insidentil. Aparatur harus mengetahui bagaimana proses yang harus dilakukan

dalam menjalankan pengawasan reklame insidentil di lapangan atau di dalam kantor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eded Rukana, S.Sos. “Kesalahan yang biasanya dilakukan itu macam-macam, salah satunya salah menentukan titik pancang”.(21/06/2012). Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat kesalahan yang muncul pada saat melakukan kegiatan kerja dalam hal pengawasan keberadaan reklame insidentil aparatur sering kali salah dalam menempatkan atau penentuan tiang pancang reklame. Kesalahan tersebut diakibatkan karena tidak akuratnya pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Kesalahan penempatan tiang pancang reklame yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dapat dilihat dari faktor individu yaitu usia, pendidikan dan motivasi.

Pengawasan keberadaan reklame insidentil yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung saat ini dilakukan oleh pelaksana pengawasan dalam rentang usia 42-55 Tahun. Usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesalahan yang dilakukan oleh aparatur. Usia aparatur di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung di Bidang Dekorasi Kota dan Reklame yang masih produktif sangat sedikit. Usia yang dominan dalam Bidang tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Usia Aparatur DPP yang Melakukan Pengawasan Reklame Insidentil di Kota Bandung

No	Usia	Jumlah
1	25-35 thn	15 orang
2	36-42 thn	18 orang
3	42-55 thn	27 orang
	Total	**60 orang**

(Sumber: DPP Kota Bandung, 2012)

Dilihat dari rentang usia aparatur yang ada di Dinas Pemakaman dan Pertamanan diatas, jelas terlihat bahwa banyaknya aparatur yang menjalankan tugas atau pekerjaan yang diberikan dalam rentang usia 42-55 tahun. Dampak dari faktor usia tersebut adalah terjadinya kesalahan dalam menentukan atau menetapkan tiang pancang pemasangan reklame insidentil. Faktor usia menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam menjalankan pengawasan. Tingkat kesalahan dalam menentukan titik tiang pancang reklame insidentil yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung mengakibatkan rendahnya kualitas kerja yang dihasilkannya.

Selain kesalahan menentukan titik tiang pancang reklame insidentil, aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sering kali melakukan kesalahan dalam memasukan data izin pemasangan reklame insidentil. Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan tidak cermatnya aparatur dalam memasukan data reklame insidentil sehingga memberikan dampak terjadinya kesalahan dalam

menentukan titik pancang pemasangan reklame. Fakta tentang kesalahan memasukan data reklame insidentil yang terlihat dilapangan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dilihat dari banyaknya ketidakcocokan antara data pemohon izin pemasangan reklame dengan data yang reklame yang sudah terpasang, sehingga menyebabkan kesalahan dalam menentukan titik tiang panca yang akan diberikan kepada pemohon baru yang mengajukan izin pemasangan reklame insidentil.

Menurut pengamatan yang dilakukan peneliti, kesalahan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung seharusnya tidak terjadi jika aparatur yang memasukan dan merekap data reklame dilakukan oleh aparatur yang memiliki usia diantara 25-35 thn. Aparatur yang berusia 25-35 thn cenderung lebih teliti untuk mendata dan memasukan data reklame secara cepat dan akurat sehingga tidak akan terjadi tingkat kesalahan dalam menetapkan atau menentukan titk tiang pancang berikutnya. Usia 25-35 thn adalah usia yang masih dapat dengan teliti melakukan pekerjaan, contohnya adalah mereka dapat mengoperasikan komputer untuk memasukan data reklame dengan cepat karena dengan keahlian yang mereka miliki. Usia 42-55 thn cenderung tidak bisa melakukan pekerjaan memasukan data dengan baik, disebabkan karena sudah lambat menjalankan pekerjaan memasukan data, sehingga memakan waktu lama untuk mendapatkan hasil data reklame insidentil yang sudah terpasang. Sejauh ini tingkat kesalahan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan cukup sedikit dalam menyelesaikan semua hambatan yang terjadi setelahnya.

4.1.2 Tingkat Kerusakan yang Dilakukan Aparatur Dalam Melaksanakan Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung

Tingkat kerusakan adalah seberapa jauh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat dalam mengawasi keberadaan reklame insidentil. Tingkat kerusakan yang dilakukan menyebabkan kinerja aparatur dalam melakukan pengawasan secara tidak akurat. Penyebabnya adalah dari kerusakan dari beberapa inventaris serta perlengkapan yang digunakan dan yang dimiliki Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung,seperti kendaraan dinas yang tidak terawat dengan baik, tangga manual serta tangga dek power tidak berfungsi dengan baik, hal ini disebabkan tidak adanya perawatan yang diawali dengan adanya laporan kondisi peralatan seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4.2
Kondisi Iventaris Operasional Lapangan DPP Kota Bandung

Jenis Kendaraan	Jumlah	Rusak
Kendaraan Roda 4 (truk)	4	2
Kendaraan Roda 4 (L300) Bak	5	1
Kendaraan Roda 2 (Motor)	5	-
Alat Perkakas	8 Set	3 set
Tambang	200 mtr	50 mtr
Tangga	5 Bh	2 bh

(Sumber : DPP Kota Bandung, 2012)

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung penyebab kurang optimalnya kinerja aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil adalah dari beberapa kerusakan alat inventaris operasional lapangan. Penyebab tersebut diperkuat oleh Bapak Didi Saripudin, selaku Pelaksana Seksi Pengendalian dan Pengawasan Dekorasi Kota dan Reklame, "Banyak alat-alat inventaris operasional yang sudah tidak layak pakai, yang menjadi kendala untuk pengawasan ke lapangan".(10/08/2012). Pada fakta dilapangan, tidak berjalan dengan baik alat-alat untuk melakukan pengawasan reklame Insidentil yaitu tambang yang sudah tidak bisa dipakai, dibiarkan saja berada di gudang dan tidak dipergunakan untuk hal lain. Kendaraan roda dua seperti motor yang disediakan untuk melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil sangat terbatas, sehingga mengakibatkan aparatur memakai kendaraan roda dua mereka untuk melaksanakan pengawasan.

Alat perkakas yang digunakan seperti tangga dan tambang pun sering kali tidak terpakai dikarenakan ada tiga dari lima tangga yang ada sudah rusak. Ketika tambang untuk pemasangan reklame dipakai semuanya, maka akibat yang akan terjadi dari pemakaian tambang yang tak layak pakai adalah kerusakan pada bahan reklame yang akan dipasang. Pemakaian tangga yang sudah rusak pun akan mengakibatkan terjatuhnya aparatur ketika pemasangan dilakukan. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat bahwa pada saat saat melakukan pengawasan keberadaan reklame baligho di wilayah cibeunying, aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung menggunakan tambang yang rusak,sehingga

mengakibatkan memakan waktu lama untuk memasangnya dikarenakan tambang yang digunakan untuk menopang dan menahan reklame tidak kuat dan sering lepas.

Menurut pengamatan peneliti, agar tidak terjadinya kerusakan pada reklame atau pada proses pengawasan, aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan melakukan pemerliharaan alat-alat inventaris operasional lapangan. Seperti merawat alat-alat yang digunakan untuk proses pengawasan. Mengganti alat-alat yang sudah tidak layak pakai menjadi yang baru. Memberikan rasa memiliki pada barang-barang yang menunjang proses pengawasan sehingga dapat memanimalisir tingkat kerusakan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Kualitas kinerja aparatur akan baik jika tingkat kerusakan yang dilakukan aparatur sedikit. Kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh aparatur DPP Kota Bandung cukup minim dalam melakukan proses pengawasan keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung.

4.1.3 Tingkat Kecermatan Aparatur Dalam Melaksanakan Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung

Tingkat kecermataan seorang aparatur dalam menjalankan sebuah pekerjaan sangat penting bagi tercapainya sebuah tujuan organisasi. Kecermatan dan ketelitian adalah faktor utama dalam memberikan kinerja yang baik dalam sebuah organisasi. Menurut hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung ada beberapa hal yang muncul dalam rendahnya tingkat kecermatan aparatur DPP Kota Bandung dalam kegiatan pengawasan

keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung di sebabkan oleh beberapa hal yaitu salah satunya adalah rendahnya ketanggapan apatur DPP Kota Bandung.

Rendahnya ketanggapan aparatur DPP Kota Bandung yang berhubungan dengan aspek kesigapan dari aparatur DPP Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung. Tingkat kesigapan dari aparatur DPP Kota Bandung dalam melakukan kegiatan pengawasan keberadaan Reklame insidentil merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian kinerja atas mutu pengawasan yang diselenggarakan. Rendahnya ketanggapan aparatur DPP Kota Bandung terhadap perwujudan mutu pengawasan keberadaan Reklame insidentil ini cukup memberi dampak bahwa berbagai upaya peningkatan kemampuan kerja dan semangat kerja kepada aparatur DPP Kota Bandung, termasuk petugas lapangan perlu mendapat perhatian yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengawasan yang lebih berkualitas dan bermutu.

Kehandalan berhubungan dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur DPP Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan reklame insidentil ini. Tingkat kemampuan dan keterampilan yang kurang dari tenaga aparatur DPP Kota Bandung tentunya akan memberikan pelayanan yang kurang memenuhi kepuasan terhadap masyarakat sebagai standar penilaian terhadap mutu pengawasan, kurangnya handalnya aparatur DPP Kota Bandung memberi indikasi akan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan tentunya akan mempengaruhi kualitas pengawasan yang

diselenggarakan. Masalah mengenai kehandalan aparatur DPP Kota Bandung yang kurang baik akan mempengaruhi terhadap kecermatan aparatur DPP Kota Bandung dalam menyelesaikan setiap tugasnya.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat kurang tanggapnya aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam menanggapi keluhan-keluhan masyarakat mengenai pengawasan keberadaan reklame insidentil yang liar atau tidak taat hukum. Hal tersebut dikemukan oleh ibu Ajeng Sulistiyawati sebagai masyarakat umum yang mengajukan pemohonan pemasangan reklame insidentil secara rutin, "Aparatur disini kurang tanggap sama keluhan masyarakat, seharusnya kalau pelayanan bagus ya masyarakat juga senang".(21/06/2012). Hasil wawancara tersebut mengartikan bahwa ketika masyarakat mengeluhkan adanya reklame umbul-umbul yang salah pasang dipagar rumah masyarakat di lokasi Jalan Cendana Wilayah Cibeunying. Laporan yang disampaikan masyarakat tidak dengan cepat ditanggapi oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung karena masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan di kantor, sehingga menyebabkan tertundanya menanggapi laporan-laporan yang disampaikan masyarakat mengenai reklame tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, penyebab dari kurang cepatnya tanggapan dari aparatur DPP Kota Bandung mengenai laporan-laporan dari masyarakat adalah kurangnya personil atau jumlah aparatur yang bertugas dalam melayani pelaporan pelayanan masyarakat. Kurangnya aparatur dalam melayani laporan-laporan atau keluhan masyarakat disebabkan oleh banyaknya pekerjaan kantor lain seperti

banyaknya pemohon perizinan pemasangan reklame setiap harinya yang harus dilayani satu-persatu oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamnanan Kota Bandung.

Keadaan aparatur DPP Kota Bandung yang jumlah terbatas menyebabkan penyelenggaraan pengawasan dilaksanakan tidak maksimal dan kurang memenuhi kepuasan serta keinginan masyarakat. Aparatur DPP Kota Bandung sendiri akan mengalami kewalahan dalam menjalankan tugasnya yang pada nantinya akan menurunkan kecermatan atau ketelitian dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung.

Masalah selain kurang tanggapnya aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam melayani masyarakat, keterampilan juga penting dalam melakukan pengawasan karena keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi serta sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Kurang terampil berarti ketidak cakapan dan ketidakmampuan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam menyelesaikan tugas khususnya dalam melakukan pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung yang terjadi dilapangan karena kurangnya keterampilan aparatur menyebabkan banyaknya tugas/pekerjaan yang tidak selesai tepat pada waktunya seperti masih banyak reklame yang habis izin pemasangan reklame, tetapi masih terpasang. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena keterlambatan mencabut reklame yang habis izin pemasangannya akan merusak keindahan Kota Bandung.

Penyebab keterlambatan mencabut reklame insidentil yang tidak taat aturan adalah tidak cermatnya aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam memilah-milah pekerjaan untuk memprioritaskan pekerjaan yang harus didahulukan. Kurangnya keterampilan tersebut terjadi ketika banyak nya pemohon yang mengajukan izin pemasangan reklame insidentil yang datang setiap hari ke kantor Dinas Pemakaman dan Pertamanan, sehingga seluruh tenaga dan personil memberikan pelayanan kepada pemohon pada saat itu. Pekerjaan yang lainnya yang seharusnya dikerjakan oleh aparatur lain, terbangkalai dikarenakan tidak dapatnya membagi tugas antara aparatur yang satu dengan aparatur yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur dalam melakukan pengawasan reklame insidentil.

Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang atau berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat di benak seseorang. Manakala informasi dan data sekedar berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk mengarahkan tindakan. Kurangnya pengetahuan aparatur DPP Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap reklame insidentil akan menghambat dan mengurangi kinerja.

Berdasarkan penelitian dilapangan kurangnya pengetahuan yang terjadi adalah ketidaktahuan aparatur dalam mengawasi reklame insidentil yang telah habis masa berlakunya. Ketidaktahuan aparatur tersebut dipengaruhi oleh usia. Faktor usia dapat mempengaruhi pengetahuan aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap reklame insidentil. Aparatur yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung sering lupa sehingga pengetahuannya tidak sebaik aparatur yang dibawah 40 tahun. Begitupula dengan faktor pendidikan, latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi pengatahuan aparatur dalam melaksanakan pengawasan reklame insidentil. Karena tingkat pendidikan yang tinggi maka pengetahuan akan lebih banyak. Maka berdasarkan hasil penelitian tersebut tingkat kecermatan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sudah cukup baik dalam melakukan pekerjaan secara teliti.

4.2 Kuantitas aparatur dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Kuantitas kinerja adalah terkait dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh seorang aparatur atau segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Kuantitas kinerja adalah salah satu aspek terpenting dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan misi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Fakta yang terjadi di lapangan dapat dilihat di dalam kinerja aparatur DPP

Kota Bandung, dari jumlah kegiatan kerja dalam pengawasan reklame insidentil penggunaan waktu, beban kerja serta jumlah aparatur tidak memiliki nilai seimbang sehingga menimbulkan kecenderungan proses kegiatan kerja serta hasil kerja yang diperoleh tidak optimal sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, kuantitas kinerja yang dilakukan aparatur DPP Kota Bandung sudah cukup optimal karena semua hal dalam proses pengawasan keberadaan reklame insidentil sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Produk pelayanan yang dihasilkan Dinas Pemakamasn dan Pertamanan Kota Bandung dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil adalah bekerja sama dengan stakeholder yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menertibkan keberadaan reklame insidentil liar yang tidak taat hukum yang berlaku. Pada setiap akhir bulan, biasanya, Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan melakukan pengawasan bersama ke beberapa titik tiang pancang di Kota Bandung. Tetapi pada prosesnya, masih ditemukan beberapa kendala yaitu tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara aparatur DPP Kota Bandung dengan Satpol PP dalam data reklame liar yang benar. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh aparatur DPP Kota Bandung dalam hal pengaduan atau keluhan tentang keberadaan reklame insidentil yang mengganggu pengguna jalan dan keindahan kota belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat yaitu ibu Diana Anggraeni yang merupakan salah satu wiraswasta di Kota Bandung yang memberikan

pendapat tentang pelayanan yang diberikan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, “Reklame insidentil ini jangka waktunya pendek dan jumlah banyak, jadi susah untuk mengawasi sehingga masyarakat yang mengeluh atau terganggu juga tidak dapat terlayani dengan baik”.(10/08/2012). Menurut pernyataan tersebut maka penyebab belum berjalannya dengan baik pelayanan pengaduan di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung adalah singkatnya jangka waktu pemasangan reklame insidentil, sehingga menyebabkan tidak terawasi semua reklame insidentil yang tidak memiliki izin legal dari Dinas DPP Kota Bandung. Setelah jangka waktu pemasangan yang singkat, faktor sarana prasana adalah salah satu yang diperlukan dalam proses pengawasan keberadaan reklame insidentil. Gedung Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sudah ada dan terletak di Jl. Seram No. 2 Bandung, digedung tersebut pemohon pengajuan pemasangan reklame insidentil dilaksanakan. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dilapangan atau di dalam kantor atau gedung Dinas pun menjadi faktor utama untuk mencapai kuantitas kinerja yang akan dicapai oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, untuk mencapai suatu kualitas kinerja aparatur yang baik di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dapat diwujudkan dengan melihat jumlah yang sudah dihasilkan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk melayani masyarakat. Produk pelayanan yang dihasilkan oleh aparatur DPP Kota Bandung saat ini sudah cukup bagus, tetapi tidak untuk sarana prasarana yang digunakan dalam proses pengawasan yang dilakukan di dalam kantor maupun di lapangan. Penyebabnya adalah tidak

adanya pemeliharaan yang baik terhadap alat-alat atau sarana yang sudah disediakan untuk proses pengawasan keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung. Tidak terpeliharanya sarana yang disediakan disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu sering kali biaya yang sudah dianggarkan untuk pemeliharaan alat-alat inventaris tidak digunakan sebagaimana mestinya dan biaya anggaran perawatan atau pemeliharaan sarana prasarana kurang banyak, sehingga menimbulkan kondisi yang belum baik di Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam melakukan pengawasan keberadaan reklame insidentil.

4.2.1 Produk Pelayanan yang Diberikan Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya adalah barang berwujud, jasa, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi antara hal-hal yang baru saja disebutkan. Berbagai kasus terkait pelanggaran terhadap reklame-reklame ilegal di Kota Bandung akhir-akhir ini semakin marak. Seperti pemakaian tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk memasang reklame insidentil saat ini banyak sekali di hiasi reklame-reklame, ataupun pemasangan reklame insidentil tanpa seizin dari pihak Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Berbagai kasus itu mengindikasikan bahwa ada yang salah dengan sistem pengawasan reklame di Kota Bandung.

Menurut wawancara dengan aparatur, masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pemasangan reklame di Kota Bandung, sehingga masyarakat tidak peduli dan menganggap reklame-reklame insidentil yang ada sudah seizin pihak Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Karena itu, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung memerlukan sistem pengawasan pemasangan reklame insidentil yang efektif dan mampu mengawasi reklame-reklame guna menjagaa keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah melalui Perda Kota Bandung nomor 4 tahun 2012 mengatur tentang penyelenggaraan reklame dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Kota Bandung.

Pengembangan produk pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Saat ini adalah bekerja sama dengan *stakeholder* terkait seperti Satpol PP untuk mengawasi keberadaan reklame-reklame insidentil secara rutin. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pemasangan reklame-reklame insidentil yang semakin banyak di Kota Bandung. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kenyamanan masyarakat. Produk pelayanan yang mempunyai kualitas tinggi merupakan suatu ukuran tentang tata cara pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan proses pelayanan mengenai pemasangan reklame insidentil wajib diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur maupun masyarakat. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh

keterbukaan dalam pelayanan, berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang berkaitan tentang produk pelayanan.

Berdasarkan keterangan aparatur, penggunaan produk dalam melayani masyarakat harus mempunyai kualitas yang tinggi mengenai penyelenggaraan reklame dapat dimengerti dan dipahami oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, tentunya akan meningkatkan kinerja yang prima karena sudah jelas dan dimengerti oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam menggunakan sistem tersebut. Produk pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dimengerti oleh tiap aparatur, sehingga dalam proses kinerja dalam mengawasi keberadaan reklame insidentil dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, bahwa produk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah kurang cepatnya aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam memproses keluhan-keluhan dari masyarakat akibat banyaknya reklame yang menggangu di sekitar lingkungan rumahnya. Pengaduan dari wilayah Cibeunying yang paling banyak memberikan pengaduan. Reklame insidentil jenis Baligho banyak mengganggu jalan di rumah masyarakat sekit jalan lapangan Supratman Kota Bandung. Menurut Asta Reza yang merupakan masyarakat umum yang berprofesi sebagai mahasiswa aktif di Intitut Teknologi Nasional, “Wilayah cibeunying itu paling banyak reklame yang menggangu jalan dan merusak area pejalan kaki, dan tidak ada tindak lanjut penertiban dari aparatur”.(10/08/2012). Contoh reklame yang menggangu jalan dan keindahan kota dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 4.1
Reklame Jenis Baligho yang merusak Jalan di Wilayah Cibeunying



(Sumber: DPP Kota Bandung,2012)

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, contoh gambar reklame baligho diatas adalah salah satu bukti bahwa belum dengan cepat aparatur menangani keluhan-keluhan atau laporan dari masyarakat mengenai keberadaan reklame yang menggangu lingkungan tempat tinggal masyarakat, jalan-jalan maupun yang lainnya. Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan mengoptimalkan pelayanan langsung jadi izin pengajuan pemasangan reklame insidentil di Kota Bandung, tetapi pada faktanya belum optimalnya pelayanan pengawasan yang diberikan kepada masyarakat sehingga masih menimbulkan beberpa kendala yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan baik.

Produk pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung. belum dapat dikatakan dengan baik, karena salah satu pemantapan dan pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung belum berjalan dengan baik.

4.2.2 Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kinerja Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung wajib memiliki sarana yang meliputi alat-alat transportasi penunjang untuk mengawasi keberadaan reklame-reklame insidentil, seperti truck, mobil, tambang, tangga serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses kerja yang teratur dan berkelanjutan. Sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruangan atau gedung tidak dapat kita pisahkan antara kegiatan aparatur dengan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dapat berjalan dengan baik, terutama dalam penyelenggaraan reklame insidentil. Maka hal utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan perlengkapan kantor adalah pengadaan sarana dan prasarana. Sarana adalah sesuatu yang secara langsung dipergunakan dalam proses kerja dan prasarana yaitu sesuatu yang secara tidak langsung di pergunakan dalam proses kerja di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanuar Pribadi, S.Sos selaku Pelaksana Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame adalah “pengadaan sarana prasarana yaitu, pengadaan perlengkapan kantor biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung terutama dalam penyelenggaraan reklame insidentil”. (21/06/2012). Pengadaan perlengkapan seperti alat-alat komputer seharusnya di rencanakan dengan hati-hati sehingga semua pengadaan perlengkapannya itu selalu sesuai dengan pemenuhan kebutuhan di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, untuk kelancaran proses kerja aparatur.

Sarana yang disediakan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung untuk menunjang proses pengawasan keberadaan reklame insidentil sudah baik. Tersedianya alat-alat inventaris yang diperlukan untuk melakukan pengawasan baik di dalam kantor maupun di lapangan, seperti tambang, mobil roda 4 (*Truck)* yang berjumlah lima buah, kendaraan roda 2 (motor) sebanyak lima buah dan alat-alat perkakas delapan set. Pada faktanya alat-alat tersebut yang disediakan oleh Dinas DPP Kota Bandung tidak dipergunakan dengan baik oleh aparatur. Penyebabnya adalah aparatur tidak saling menjaga dan merawat alat-alat tersebut sehingga alat-alat tersebut menjadi rusak dan tidak layak pakai. Tambang atau tali yang seharusnya digunakan untuk menopang reklame saat di pasang atau diturunkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu pula, Gedung yang bertempat atau berlokasi di Jl. Seram No. 2 Kota Bandung ini adalah tempat semua pusat proses pengawasan dilakukan. Tempat yang bersih menjadikan tempat yang nyaman untuk melakukan proses pengawasan reklame di dalam

kantor. Tetapi, ruangan yang disediakan di dalam gedung Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sangatlah sempit, dikarenakan gedung yang ditempati sangat kecil. Ruangan penyimpanan alat-alat pengawasan sangatlah kecil, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang terjadi pada sarana yang sudah disediakan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung khususnya dalam penyelenggaraan pengawasan reklame insidentil sudah dapat dikatakan baik, karena alat-alat untuk pengawasan seperti komputer, printer, tambang, motor, truk, alat perkakas sudah disediakan oleh DPP Kota Bandung dan fasilitas gedung yang memadai, lingkungan yang bersih dan rapi serta infrastruktur yang cukup baik, sehingga aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan lancar.

4.2.3 Biaya yang mendukung Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Seorang aparatur harus dapat menentukkan proses yang akan digunakan, serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengawasan reklame insidentil dapat mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan.dalam pengadaan kebutuhan tersebut. Biaya dalam penyelenggaraan pengawasan reklame insidentil dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada besaran biaya yang dibutuhkan. Pembebanan biaya secara akurat dalam

penyelenggaraan pengawasan reklame insidentil yang ada di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung., biaya sangatlah penting. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pengawasan reklame insidentil tidak dapat dipastikan secara nominal, namun biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar dibandingkan dengan proses perijinan penyelenggaraan reklame insidentil yang dilakukan secara manual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung biaya yang dibutuhkan bagi aparatur dalam perijinan penyelenggaraan dan pengawasan reklame insidentil cukup besar, meskipun tidak dapat dipastikan dalam ukuran nominal, tetapi lebih besar apabila dilalukan secara manual. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya, aparatur yang berkompetensi merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan pada setiap kinerja aparatur melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pelayanan. Pengembangan sumber daya aparatur di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung diarahkan kepada pembentukan kualitas layanan pengawasan reklame insidentil melalui peningkatan sumber daya pendidikan dan pelatihan atau diklat pada aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.

Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan keberadaan reklame insidentil yang tidak berijin berasal dari dana anggaran Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sendiri. Jumlah biaya yang sudah diperhitungkan untuk alokasi proses pengawasan sudah cukup untuk melakukan pemeliharaan alat-alat inventaris operasional lapangan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota

Bandung. Tetapi pada faktanya, biaya tersebut tidak dilakukan untuk perawatan alat-alat, sehingga menyebabkan tidak terawatnya alat-alat penunjang proses pengawasan keberadaan reklame insidentil. Tudak adanya rasa ingin memelihara alat-alat yang sudah disediakan menjadi penyebab dana atau biaya yang disediakan tidak terpakai. Selain biaya yang dialokasikan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung untuk sarana dan prasana, biaya operasional menjadi penyebab tidak berjalannya pengawasan yang dijalankan oleh aparatur DPP Kota Bandung. Menurut Ibu Dewi Gantini, SE yang melayani masyarakat dalam mengajukan pemohonan pemasangan reklame insidentil,"Biaya pemasangannya tidak dilakukan disini, tetapi di DISPENDA, biaya pemohonan disini gratis". (21/06/2012). Menurut hasil penelitian bahwa biayanya sangat beragam, tetepi biasanya yang dikeluarkan oleh masyarakat pemohon pemasangan reklame insidenti adalah dua ratus ribu rupiah untuk dapat memasang reklame insidentil.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, biaya operasional yang sedikit atau biaya yang diberikan kepada pekerja pengawasan sangat sedikit dari yang mereka harapkan yang menyebabkan faktor malas untuk melakukan pengawasan ke lapangan. Jika Dinas Pemakaman dan Pertamanan dapat memberikan biaya lebih sesuai dengan kebutuhan mereka secara rata makan akan tercipta pula proses pengawasan yang lancar dan rutin. Sehingga dari segi biaya sudah dikatakan cukup baik, karena sudah ada dan alokasi yang cukup dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung untuk proses pengawasan, hanya saja perlu untuk ditingkatkan lagi. Agar proses pengawasan tetap berjalan dengan baik

dengan aparatur yang mengerjakan pun dapat melakukan pekerjaannya dengan baik tentunya dengan keseimbangan yang baik pula.

4.3 Penggunaan Waktu Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Waktu adalah yang digunakan secara optimal oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang menghasilkan kinerja yang baik untuk mencapai tujuan dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung atau dapat diartikan sebagai seluruh rangkaian saat ketika proses perbuatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung secara terukur, waktu yang digunakan maupun yang terbuang atau keadaan berada atau yang sedang berlangsung.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Didi Saripudin selaku Pelaksana Seksi Pengendalian dan Pengawasan Dekorasi Kota dan Reklame, “waktu menjadi kendala utama dalam melaksanankan pengawasan reklame insidentil, ga cukup waktu yang sedikit seperti sekarang ini”.(21/06/2012). Menurut aturan yang berlaku di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam menentukan waktu, sebagai penyelenggaraan pengawasan reklame insidentil merupakan langkah pemerintah untuk memberikan peringatan kepada penyelenggara reklame insidentil dalam menjalankan tugasnya. Maksud dari peringatan tersebut bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan waktu yang telah ditentukan, ketentuan waktu tersebut yaitu telah ditentukan sekitar dua minggu sudah dapat direkomendasi

melalui proses sertifikasi. dengan itu pihak penyelenggara reklame insidentil akan dibatasi sikapnya, mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pribadinya melainkan menjalankan tugas guna kepentingan pemerintah dan negara. Tugas-tugas aparatur yang dilakukan dalam pengawasan reklame insidentil seperti pengumpulan data mengenai keberadaan reklame memang belum terlaksana dengan maksimal karena masih adanya kendala, akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala Dinas.

Berdasarkan uraian wawancara tersebut, bahwa norma atau aturan dapat mempengaruhi sikap pelaksana pelayanan dan juga melalui norma atau aturan pelaksanaan pengawasan reklame insidentil. Penggunaan peralatan untuk kegiatan harian perlu adanya waktu yang efektif dan efisien. Salah satu pemacu kearah itu adalah peran pimpinan yang harus dapat menjadi *leader* serta merupakan prioritas utama bagi sosialisasi pengawasan reklame insidentil dengan ketentuan waktu yang tepat. Sehingga pengawasan reklame insidentil dapat berjalan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Meningkatkan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan secara keseluruhan yang meliputi semua kompunen atau aspek terlibat seperti sumber daya aparatur, perangkat keras, data reklame dan lain sebagainya, sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal dan berkesinambungan.

Tingkat ketidakhadiran dan tingkat keterlambatan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sangat mempengaruhi proses pengawasan keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung. Aparatur yang sering kali absen, izin, atau sakit akan menghambat proses pengawasan. Faktanya

di lapangan, masih banyak aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan yang tidak masuk kantor dengan berbagai alasan. Walaupun sudah ada ketentuan yang resmi dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan bahwa jika 2 Kali alpa masih dalam batas wajar. Absen tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Absensi Aparatur DPP Kota Bandung



(Sumber: DPP Kota Bandung, 2012)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat sejauh mana tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya. Hasil dari pengamatan peneliti dilapangan dan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung waktu yang diperlukan dalam pengawasan reklame insidentil kurang lebih dalam jangka waktu satu minggu satu kali, karena dengan adanya persyaratan ijin penyelenggaraan reklame insidentil ini dapat berjalan cukup cepat, tetapi belum adanya konsistensi waktu yang

diperlukan dalam pelaksanannya. Perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya aparatur yang baik, untuk menjamin keberhasilan pengawasan reklame insidentil di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dengan tepat pada waktunya.

4.3.1 Tingkat Kehadiran Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Adanya kekurangan – kekurangan dalam disiplin kerja aparatur DPP Kota Bandung yaitu pada tingkat kehadiran aparatur DPP Kota Bandung ikut yang terus meningkat sehingga mempengaruhi terhadap kuantitas kerja aparatur DPP Kota Bandung, serta menjadi fenomena yang dapat mencerminkan bertambahnya permasalahan dalam hal kinerja aparatur DPP Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya mengawasi maraknya reklame insidentil di Kota Bandung.

Akibat lain dai rendahnya disiplin kerja aparatur ini dalam hal pemuasan layanan terhadap *stake holders* serta sulitnya mencari kesamaan pandangan dalam pengelolaan dan penanganan masalah reklame insidentil, yang disebabkan tidak adanya pijakan yang terstruktur dan terencana sehingga dikhawatirkan akan mengurangi kepuasan terhadap *stake holders*, akuntabilitas publik dan lain-lain, serta sebagai bahan evaluasi setiap pekerjaan dapat tepat waktu, tepat sasaran, penjaminan pengawasan serta efisiensi biaya.

Berikut di bawah ini peneliti sajikan data mengenai data ketidakhadiran aparatur DPP Kota Bandung pada periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Table: 4.3
Prosetase Tingkat Kehadiran Aparatur DPP Kota Bandung

Bulan	Ijin (Orang)	Sakit (Orang)	Alfa (Orang)
Januari	5	4	3
Februari	5	4	5
Maret	7	4	4
April	8	3	3
Mei	9	5	3
Juni	7	3	4
Juli	8	4	3
Agustus	8	5	4
September	7	2	4
Oktober	9	3	5
Nopember	6	3	3
Desember	7	4	4
Jumlah	**86**	**41**	**45**

(Sumber : DPP Kota Bandung, 2011)

Dari table diatas menunjukan tingkat ketidakhadiran aparatur DPP Kota Bandung dari bulan januari 2011 sampai dengan Desember 2011, Maksud dari tabel diatas adalah menunjukan alasan ketidakhadiran aparatur karena ijin menduduki peringkat pertama, kemudian peringkat kedua di duduki oleh Alfa dan yang terakhir karena sakit. Kondisi tingkat kedisplinan sebagaimana tertera pada tebel diatas, akan member peluang adanya gejolak dimasyarakat, sehingga di khawatirkan tindakan pelanggaran disiplin ini tidak hanya akan merusak para aparatur melakukan pelanggaran disiplin tetapi akan memberikan pencitraan yang buruk terhadap kinerja DPP Kota Bandung. Menyingkapi kondisi permasalahan tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan aparatur DPP Kota Bandung maka peneliti berpendapat Perkembangan dinamika masyarkat yang terus berkembang

yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat didalam kegiatan usaha tanpa kecuali kegiatan kerja di DPP Kota Bandung dalam hal kegiatan pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung, yang menuntut seluruh aparatur DPP Kota Bandung untuk lebih mampu beradaptasi, mempunyai ketahanan, mampu melakukan perubahan arah dengan cepat dan memusatkan perhatiannya target pekerjaan yang harus di selesaikan termasuk terhadap para aparatur itu sendiri yang merupakan asset serta SDM bagi DPP Kota Bandung.

Menurut pengamatan peneliti, suasana kerja seperti sekarang ini, DPP Kota Bandung didalam di tuntut harus mampu untuk menjadi mitra kerja yang dapat diandalkan untuk dapat melatih dan mengarahkan serta membina para aparatur menjadi aparatur pemerintah yang memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi, wawasan dan pengetahuan yang luas, bakat dan potensi, kepribadian dan motif kerja, serta moral dan etos kerja yang tinggi. Hal tersebut merupakan bagian dari Fungsi pokok DPP Kota Bandung dalam mengkoordinasikan, mengelola, melaksanakan dan mengontrol kelancaran tugas dan pekerjaan, baik yang bersifat administrasi maupun operasional lapangan khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung. Dinas DPP Kota Bandung mengharapkan setiap bekerja mampu dan dengan baik dapat menghasilkan kinerja yang tinggi, sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan lebih mudah untuk dicapai. Keinginan tersebut akan lebih mudah tercapai apabila aparatur yang telibat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yadi Mustopa selaku Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, “Rata-rata aparatur yang tidak masuk itu karena

ijin dan sakit, yang alfa tanpa keterangan tidak banyak".(22/06/2012). Terlihat sangat jelas bahwa masih banyak aparatur yang tidak masuk kerja seperti data yang diatas dan diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Suparyono. Penyelesaian yang harus diambil dalam menekan tingkat ketidakhadiran aparatur DPP Kota Bandung ini adalah sikap disiplin, para aparatur DPP Kota Bandung sangat dalam rangka mewujudkan suatu tujuan dalam hal DPP Kota Bandung yaitu dalam hal penanganan reklame insidentil. Adanya disiplin kerja pada setiap aparatur yang ada di DPP Kota Bandung, akan menjadikan DPP Kota Bandung menjadi maju. karena setiap aparatur yang berdisiplin dalam melakukan pekerjaan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ada di DPP Kota Bandung, walaupun tidak secara keseluruhan menghasilkan pekerjaan yang sempurna. Tetapi dalam jangka waktu tertentu aparatur akan melaksanakan pekerjaannya menjadi lebih baik.

Pembinaan disiplin yang efektif, agar tetap konsisten dalam melakukan kegiatannya, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Disiplin bukan merupakan suatu bentuk siksaan atau hukuman yang diberikan oleh DPP Kota Bandung kepada aparatur yang melanggarnya, tetapi merupakan suatu bentuk pelajaran dan pelatihan kepada aparatur agar dapat belajar dari kesalahannya, dengan begitu diharapkan aparatur akan dapat meningkat kedisiplinannya. Disiplin kerja yang efektif sebaiknya di arahkan kepada perilakunya dan bukannya kepada aparatur secara pribadi, karena alasan pendisiplinan adalah untuk mencapai pengembangan kerja aparatur. Aparatur diharapkan dapat belajar dari apa yang telah di perbuatnya dan secara suka rela menjalankan segala bentuk peraturan yang diberikan oleh DPP Kota Bandung.

4.3.2 Tingkat Keterlambatan Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung

Terlambat merupakan suatu peristiwa dimana suatu hal baik itu pekerjaan maupun program tidak berjalan tepat pada waktunya. Tingkat keterlambatan aparatur DPP Kota Bandung adalah ketidaktepatan waktu yang dilakukan oleh aparatur DPP Kota Bandung dalam melakukan pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung. Keterlambatan yang terjadi pada aparatur DPP Kota Bandung adalah terlambatnya aparatur dalam menertibkan reklame insidentil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti malas, selalu menunda pekerjaan, sedikitnya waktu untuk melakukan pengawasan, cuaca/iklim dan ada hal atau kejadian diluar rencana yang menimpa aparatur DPP Kota Bandung.

Setelah faktor diatas, motivasi adalah salah satu faktor yang sangat diperlukan dalam bekerja karena dengan motivasi atau semangat yang tinggi seseorang akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik , bahkan sangat baik. Namun sayangnya yang terjadi dilapangan tidak sedikit aparatur justru cenderung malas ke lapangan untuk melakukan pengawasan reklame insidentil. Sifat malas tersebut akan sangat merugikan dan menghambat pekrjaan, bahkan akan sangat memperburuk keadaan karena pekerjaan akan terus bertambah dan menumpuk sehingga tidak dapat diselaesaikan tepat pada waktunya. Sifat malas tersebut akan mengakibatkan seorang aparatur selalu menunda pekerjaannya. Menunda pekerjaan adalah suatu perilaku yang memiliki pola pikir bahwa semua pekerjaan dapat diselesaikan tanpa harus dilakukan dengan cepat atau tanpa harus dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa disadari menunda pekerjaan akan

menjadi suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan bahkan cenderung sulit untuk dihilangkan, akibatnya seiring berjalannya waktu tanpa disadari pekerjaan semakin banyak dan tidak dapat terselesaikan. Menunda pekerjaan merupakan kebiasaan buruk karena dengan menunda pekerjaan akan mengurangi kinerja dan menurunkan kualitas aparatur.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, bahwa beberapa aparatur ada yang menunda pekerjaannya. Menurut Bapak Yadi Mustopa selaku Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, "penundaan pekerjaan yang terjadi berakibat langsung terhadap banyaknya pekerjaan yang dilakukan didalam kantor".(22/06/2012). Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah jika dalam satu hari ada satu pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, otomatis pekerjaan tesebut harus dilakukan pada hari berikutnya, sehingga akan menambah pekerjaan pada hari berikutnya, hal ini akan berlangsung setiap hari karena setiap hari akan ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan, akibatnya pekerjaan dalam melakukan pengawasan reklame insidentil tidak berjalan dengan baik. Waktu yang tersedia bagi aparatur DPP Kota Bandung untuk melakukan pengawasan tidak cukup karena seperti pada waktu yang diperlukan, bahwa waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan hanya 2 jam. Tentu saja dengan semua faktor yang ada seperti malas, menunda pekerjaan, ditambah waktu yang tersedia sangat terbatas akan menyebabkan keterlambatan aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap reklame insidentil di Kota Bandung. Selain itu faktor cuaca yang tidak mendukung akan sangat menghambat proses pengawasan reklame insidentil..

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, penyebab keterlambatan aparatur DPP Kota Bandung dalam melakukan pengawasan reklame insidentil adalah karena kondisi atau cuaca hujan, aparatur tidak bisa menjalankan atau melaksanakan pengawasan ke lapangan. Karena selain basah hujan juga dapat menyebabkan, kemacetan, rusaknya sarana prasarana. Sudah kita ketahui bahwa volume kendaraan Kota Bandung semakin padat, terutama saat turun hujan kemacetan pasti terjadi. Dengan terjadinya kemacetan akibat hujan, maka proses pengawasan akan terhambat, dan waktu akan terbuang di tengah kemacetan. Di samping ketiga faktor tersebut, hal yang mempengaruhi tingkat keterlambatan aparatur DPP Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap reklame insidentil adalah adanya kejadian diluar rencana atau hal-hal tidak terduga yang terjadi pada masing-masing individu aparatur DPP Kota Bandung. Kesehatan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan. Kesehatan menjadi salah satu penyebab aparatur DPP Kota Bandung mengalami keterlambatan. Hal tersebut karena kesehatan tidak bisa diketahui kapan akan sakit. Bila kesehatan aparatur terganggu (sakit) otomatis aparatur tidak bisa bekerja dengan maksimal dan pekerjaan akan bertambah bahkan tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Ketika aparatur sakit biasanya tidak masuk kerja selama 3 hari, bahkan jika sakit serius bisa ijin berminggu- minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Menurut informasi berikut sangat jelas jika dalam satu hari saja pekerjaan tidak dikerjakan minimal akan ada satu pekerjaan yang tersisa, terutama jika sampai berminggu – minggu dan berbulan-bulan.

Jika dalam satu minggu selama enam hari kerja berarti minimal ada enam pekerjaan yang tidak terselesaikan, ditambah jika sampai berbulan-bulan berarti Dua puluh empat hari kerja, otomatis dalam satu bulan akan ada dua puluh empat pekerjaan yang tidak terselesaikan, itu pun dihitung tiap individu, jika dalam satu hari ada lebih dari satu aparatur yang tidak bekerja karena sakit, maka sudah pasti pekerjaan akan sangat banyak, dan tidak akan selesai tepat pada waktunya. Berdasarkan faktor-faktor diatas maka tingkat keterlambatan aparatur DPP Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung, dampaknya sangat besar kepada ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan melakukan pengawasan reklame insidentil dan menurut hasil pengamatan dilapangan bahwa kinerja aparatur DPP Kota Bandung belum cukup baik, karena tidak sedikit pekerjaan atau titik pengawasan yang tidak selesai tepat pada waktunya.

4.3.3 Waktu yang Diperlukan Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Waktu adalah faktor yang paling berharga dalam melakukan pekerjaan. Waktu yang diperlukan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil merupakan waktu yang harus digunakan oleh aparatur untuk melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang terjadi bahwa waktu yang ada kurang cukup untuk melakukan pengawasan reklame insidentil, karena waktu yang tersedia dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai 11.00 WIB. Dengan waktu yang hanya 2 jam

sangat tidak cukup untuk melakukan pengawasan reklame insidentil mengingat luas wilayah Kota Bandung yang luas yang mempunyai beberapa titik pengawasan seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Wilayah Tiang Pancang Pengawasan Reklame Insidentil

No	Wilayah	Jumlah Lokasi
1	Wilayah Bojonegara	14 Titik
2	Wilayah Cibeunying	14 Titik
3	Wilayah Karees	8 Titik
4	Wilayah Tegalega	5 Titik
5	Wilayah Ujung Berung	5 Titik
6	Wilayah Gede Bage	2 Titik

(Sumber: DPP Kota Bandung, 2011)

Luas wilayah Kota Bandung memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan pengawasan, dengan kondisi dilapangan yang mempunyai 6 wilayah dan 48 titik pengawasan waktu yang diperlukan seharusnya lebih dari 2 jam. Menurut informasi dilapangan untuk mengawasi satu titik lokasi reklame insidentil memerlukan waktu minimal setengah jam. Waktu dua jam berarti rata rata hanya mampu mengawasi empat titik, kurangnya waktu dalam melakukan pengawasan sangat menyulitkan aparatur saat melakukan pengawasan reklame insidentil dilapangan. Selain waktu yang tersedia hanya dua jam dan tidak cukup untuk melakukan pengawasn di empat puluh delapan titik, sedikitnya personil juga menjadi faktor penghambat waktu dalam melakukan pengawasan.

4.4 Kerja Sama yang Dilakukan Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Pemasangan reklame liar merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Kota Bandung. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab maraknya keberadaan reklame liar, salah satunya seperti terjadi di wilayah Cibeunying terutama di Jl. Dipatiukur. Untuk itu, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung melakukan pengawasan dengan bekerja sama dengan aparatur lainnya untuk memberantas pemasangan reklame liar atau reklame insidentil. Penertiban reklame insidentil nantinya akan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti bidang derokasi Kota dan reklame, seksi penataan dekorasi Kota reklame dan bagian-bagian bidang lainnya yang terkait tentang pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, banyaknya reklame liar (tanpa izin) di Kota Bandung membuat Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung menjadi masalah serius, sebab Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung ini harus ekstra melakukan penertiban reklame dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi serta menyita waktu dan kerja sama anatar tim. Menyikapi hal ini, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung akan membuat hak inisiatif menggodok Perda terkait sanksi tegas kepada pemilik reklame-reklame liar yang terbukti memasang tanpa ada izin.

Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung mengadakan pelaksanaan penertiban reklame liar yang akan dilakukan dalam lima tahap. Tahap

pertama, Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung melakukan pengecekan data terlebih dahulu terkait dalam pemasangan reklame, maksudnya reklame mana yang masih mempunyai izin dan masih mempunyai masa waktu yang panjang. Sementara untuk penertiban tahap keduaa, sambungnya, dilaksanakan selama pekan pertama dan kedua rencananya, penertiban tahap kedua akan berlangsung selama sepekan. Adapun sasaran kerja sama penertibannya yakni, di wilayah Cibeunying dimana terdapat beberapa reklame yang akan ditertibkan. Antara lain reklame baliho,, reklame spanduk, reklame umbul-umbul, reklame poster, reklame stiker, reklame balon udara, reklame slide atau film, reklame selebaran, reklame flag chain atau gimik, reklame banner, dan lain-lain.

Bentuk kerja sama yang dilakukan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 dan Peraturan WaliKota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaran Reklame. Akan tetapi dengan adanya peraturan tentang pelaksanaan reklame liar tidak sesuai dengan peraturannya, terdapat ada berapa banyak jumlah reklame yang terdapat di wilayah Cibeunying Kota Bandung dan wilayah lainnya. Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung tidak dapat menjelaskan berapa banyak reklame yang mempunyai izin maupun yang tidak mempunyai izin. Menurut Ibu Dewi Gantini selaku Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. "Jumlah papan reklame itu selalu berubah. Sebab, katakanlah hari ini ada 50, tapi besok bisa jadi ada 55 karena ada izin yang baru

masuk. Bisa juga sebaliknya. Jumlahnya bisa berkurang, karena ada yang pajaknya atau masa berlaku izinnya sudah habis".(21/06/2012).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung dalam pengawasan dan peneritban reklame insidentil yang tidak berizin adalah dengan bekerja bersama-sama dengan instansi lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu instansi yang bekerja sama dengan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban reklame insidentil selama satu kali dalam satu bulan. Aparatur Satpol PP dan aparatur DPP Kota Bandung bekerja sama dalam penertiban reklame insidentil di Jl. Jakarta Kota Bandung seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.3
Aparatur Satpol PP dan DPP Kota Bandung
dalam Penertiban Reklame Insdentil



(Sumber: DPP Kota Bandung, 2012)

Seperti gambar diatas, bahwa aparatur Satpol PP dan DPP Kota Bandung melakukan penertiban dan pengawasan secara langsung ke lapangan. Pada faktanya adalah, tugas dari Satpol PP adalah mengawasi keberdaan reklame tetap atau permanen, sedangkan tugas pengawasan untuk keberadaan reklame insidentil dilakukan oleh Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung. Kerja sama yang terbentuk dengan Satpol PP terdapat pada Peraturan WaliKota Bandung Nomor 213 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaran Reklame. Kerja sama tersebut berjalan sesuai dengan aturan. Tetapi sering kali pengawasan yang dilakukan belum cukup optimal yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Kerja sama yang dilakukan oleh ke dua belah pihak sudah cukup baik sehingga dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik pula.

4.4.1 Kompetensi Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Pengawasan keberadaan reklame liar di Kota Bandung merupakan bagian intergal dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah Propinsi Jawa Barat. Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Dinas Pemakaman dan Pertamanan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Pengawasan keberadaan reklame liar di Kota Bandung. Oleh karena itu, program Pengawasan keberadaan reklame liar di Kota Bandung harus diperbaharui dengan perubahan mendasar dan harus mengadung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah serta berorientasi pada pengembangan keunggulan kompetitif.

Masalah kinerja aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Kinerja aparatur mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana tetapi tanpa dukungan kinerja aparatur yang handal, kegiatan Dinas Pemakaman dan Pertamanan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci pokok, kinerja aparatur akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Tuntutan Dinas Pemakaman dan Pertamanan untuk memperoleh, mengembangkan dan mempertahankan kinerja aparatur yang berkualitas semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang selalu berubah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanuar Pribadi S.Sos,. di Dinas Pemakaman dan Pertamanan,“aparatur yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan keberadaan reklame insidentil selama ini adalah aparatur yang sudah memiliki pengalaman kerja yang sudah cukup lama”. (21/06/2012). Aparatur yang sudah lama bekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang lebih lama dalam melaksanakan pengawasan reklame insidentil dibandingkan dengan aparatur yang masih baru dan belum memiliki pengalaman yang lama dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya adalah ketika menghadapi keluhan dari masyarakat tentang reklame insidentil yang mengganggu atau rusak, aparatur yang sudah mempunyai pengalaman, mampu untuk menyelesaikannya

dengan baik. Berbeda dengan yang belum mempunyai pengalaman yang lama, mereka cenderung lebih lama dalam menghadapi proses pengaduan atau keluhan yang terjadi dalam proses pengawasan keberadaan reklame insidentil.

Menurut pengamatan peneliti dilapangan, faktor pengalaman yang lama sangat berpengaruh dalam melakukan pengawasan keberadaan reklame insidentil yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung di pengaruhi oleh lama masa kerja seorang aparutur. Lama masa kerja yang membedakan antara aparatur yang lama dan yang baru. Aparatur yang memiliki masa kerja yang sudah lama akan lebih memahami proses pengawasan keberadaan reklame insidentil bila dibandingkan dengan aparatur yang memiliki masa kerja baru. Fakta tersebut mengatakan bahwa kemampuan seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya dengan baik sangat diperlukan dan dapat ditentukan dengan melihat lama masa kerja yang dimilikinya. Kompetensi ini dapat menghasilkan kerja sama yang baik dalam bekerja jika dilakukan kombinasi anatara aparatur, dan kompetensi di Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sudah cukup baik dilakukan sampai saat ini.

4.4.2 Prestasi Kerja Aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Dalam Pengawasan Keberadaan Reklame Insidentil di Kota Bandung.

Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung merupakan salah satu bentuk organisasi yang menjalani fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap prestasi kerja aparaturnya. Prestasi kerja aparatur dinas dapat didapatkan dengan cara

dilakukannya pembinaan, disiplin kerja, evaluasi kerja aparaturnya dan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Bila atasan dapat melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dengan baik, maka fungsi pengawasan di Dinas Pemakaman dan Pertamanan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Prestasi kerja dapat juga berarti mengusahakan apa yang dicapai agar dilaksanakan sesuai dengan aturan, dan instruksi yang telah direncanakan dapat menilai hasil pekerjaan serta apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan.

Berdasarkan wawancara dengan Pelaksana Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame, "prestasi kerja yang dilakukan seorang aparatur perlu adanya pengawasan dari atasan akan dipersepsi oleh kinerja aparaturnya".(22/06/2012). Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yanuar Pribadi, persepsi dapat diartikan sebagai proses seleksi, pengorganisasian dan pemaknaan terhadap stimulus dari lingkungan. Melalui persepsi ini maka aparatur akan memberikan pemaknaan tersendiri terhadap pengawasan yang diberikan atasan. Pengertian ini bisa berbeda-beda untuk setiap individu, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah kebutuhan. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan seorang atasan akan dipersepsi oleh bawahannya sebagai sesuatu yang yang positif atau negatif. Apabila pengawasan yang dilakukan atasan sesuai dengan kebutuhan aparatur, dalam arti atasan melakukan pengawasan secara teratur terhadap aparatur, terutama saat aparatur bekerja, memberikan perhatian, pengarahan, dan petunjuk serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh aparatur,

maka aparatur akan mempersepsi positif terhadap pengawasan yang dilakukan oleh atasan sehingga dari persepsi yang positif akan menentukan perilaku aparatur dalam bekerja seperti perilaku disiplin dalam bekerja.

Sebaliknya jika pengawasan yang dilakukan seorang atasan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh aparatur, dalam arti atasan tidak pernah melakukan pengawasan secara teratur, terutama saat aparatur bekerja tidak memberikan petunjuk dan pengarahan, tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan aparatur, maka hal ini akan dipersepsi negatif oleh aparatur. Dari persepsi negatif akan menentukan perilaku aparatur sehubungan dengan pengawasan atasan yaitu ditunjukan dengan ketidak disiplinan dalam bekerja. Disiplin kerja adalah suatu sikap, perilaku yang dilakukan secara sukarela dan penuh kesadaran serta keadaan untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung baik tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tidak disiplin yang timbul merupakan cerminan dari persepsi negatif aparatur terhadap pengawasan yang dilakukan oleh atasan. Sebaliknya perilaku disiplin yang timbul merupakan cerminan dari persepsi positif terhadap pengawasan atasan. Berkaitan dengan disiplin, untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sulit, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain tujuan dan kemampuannya, teladan pimpinan, balas jasa (gaji dan kesejahteraan), keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukum, ketegasan (peraturan). Pengawasan dari atasan merupakan salah satu faktor dalam menciptakan disiplin kerja aparatur

Penilaian prestasi kerja aparatur mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai aparatur.

Menurut pengamatan peneliti dilapangan, prestasi kerja ayang dicapai oleh seseorang aparatur yang tekun dan benar melakukan pekerjaannya dalam pengawasan keberadaan reklame insidentil di Kota Bandung maka ada beberapa timbal balik yang didapatkannya. Apabila aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan tepat waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan reklame insidentil di Kota Bandung, maka akan cepat terselesaikan proses memamasukan data atau merekap data jumlah keberadaan reklame insidentil yang melanggar aturan. Pada faktanya aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan tidak dengan cepat melakukan pengawasan tersebut, dikarenakan, terlalu banyaknya pemohon yang datang setiap hari untuk mengajukan permohonan perizinan pemasangan reklame insidentil. Habisnya waktu yang dilakukan aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan di dalam kantor untuk melayani masyarakat, menjadikan berkurangnya waktu untuk melakukan pengawasan. Bentuk prestasi kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan ketika aparatur dapat menjalankan tugasnya dengan baik adalah memberikan hadiah *(Reward)* berupa uang gaji kepada mereka sebagai bentuk motivasi agar dapat menajalankan tugas pengawasan dengan lebih baik lagi. Berdasarkan penjelasan diatas, pada faktanya prestasi kerja aparatur Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung yang didapat dan dimiliki oleh meraka adalah berupa gaji dalam bentuk uang dan sertifikat yang sudah cukup diberikan oleh Kepalas Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung selaku atasan kepada aparatur.